

Hari, Tanggal : Jumat, 25 Februari 2022

Waktu : 14.30-Selesai Wita

Tempat : Ruang Departemen Ilmu Sejarah,
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

**KEPEMIMPINAN BALI: STUDI KASUS TRANSMIGRASI
BALI DI KECAMATAN SUKAMAJU TAHUN 1971-1997**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada
Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Arya Yulia Andika K

F061171513

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

SKRIPSI

**KEPEMIMPINAN BALI: STUDI KASUS TRANSMIGRASI BALI DI
KECAMATAN SUKAMAJU TAHUN 1971-1997**

Disusun dan diajukan oleh:

ARYA YULIA ANDIKA K

F061171513

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 25 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D.
NIP. 197410162003121001

Dis. Dias Pradadimara, M.A., M.S
NIP. 196412171998031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 19640716 199103 1 010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**


Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP. 197608272008011011




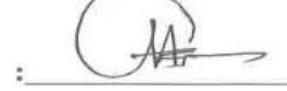
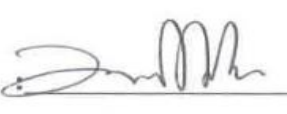

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Jumat, 25 Februari 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**KEPEMIMPINAN BALI: STUDI KASUS TRANSMIGRASI BALI DI
KECAMATAN SUKAMAJU TAHUN 1971-1997**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.



- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1. Amrullah Amir, S.S.,M.A.,Ph.D. | Ketua | : |  |
| 2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Sekretaris | : |  |
| 3. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum | Penguji I | : |  |
| 4. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. | Penguji II | : |  |
| 5. Amrullah Amir, S.S.,M.A.,Ph.D. | Konsultan I | : |  |
| 6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Konsultan II | : |  |

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Arya Yulia Andika

NIM : F061171513

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah / Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

KEPEMIMPINAN BALI: STUDI KASUS TRANSMIGRASI BALI DI KECAMATAN SUKAMAJU TAHUN 1971-1997

Adapun karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat di dalamnya unsur-unsur plagiarisme dan tidak dapat dibuktikan metode historiografinya, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 12 April 2022

Yang membuat pernyataan



Arya Yulia Andika

KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu, Om Awighnam Astu Namoh Sidham” Semoga fikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa syukur tak kan habis penulis haturkan kehadapan **Ida Shang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa**. Atas semua kemudahan, semua tantangan, semua suka dan duka sehingga penulis bisa menyelesaikan salah satu kewajiban penulis sebagai seorang mahasiswa.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi, tidak sedikit hambatan yang harus dilalui. Tapi berkat bantuan banyak pihak, masalah ini bisa teratasi. Pertama rasa terimakasih tak terhingga untuk Mama **Ni Made Masni Wedastri** yang selalu hadir dengan segala doa dan harapan baik untuk penulis. Saya enggan menyebutnya almarhum, sebab kasihnya selalu bersama penulis kapanpun. Terimakasih teramat juga untuk Bapak **I Ketut Karya Sumada** dengan segala kesedihan yang menimpa, dia tetap berusaha memenuhi dengan materi dan kasih tanpa henti. Pak, yuli sudah sarjana, terimakasih sudah jadi Bapak dan Mama sejak 2016 dengan sangat baik. Mama, Bapak yuli berhasil.

Tak lupa ucapan terimakasih untuk saudara-saudara penulis, **Arya Nada Firsawan** berbahagialah bersama mama, saya rindu selalu. Adikmu sudah sarjana sesuai dengan keinginanmu. Untuk **Arya Mely Federika**, terimakasih sudah mendaftarkan saya di jurusan ini dan saya bisa menyelesaikannya, menjadi apapun saya kelak pilihan mu adalah yang sangat besar menentukannya. Untuk **Arya Yudis Prasetya** terimakasih sudah menjadi adik yang baik dan selalu

menemani bapak di rumah dengan segala kesepian itu, bersiaplah untuk menghadapi masa ini juga dek.

Untuk keluarga besar penulis, **Abang Ati, Nini (nenek), Pak Man, Kak Vera, Mek De, Pak Guru, Ibu, Kak Yudi** terimakasih sudah mendukung dengan segala kemampuan kalian. Berbahagialah berkat bantuan kalian penulis bisa tetap berdiri sampai detik ini. Teruntuk abang ati, ati adalah yang terbaik untuk penulis kembali.

Untuk dosen penasihat akademik Bapak **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A** terimakasih atas semua kemudahan yang diberikan kepada penulis. Untuk pembimbing akademik I, Bapak **Amrullah Amir, S.S.,M.A.,Ph.D** , terimakasih untuk bimbingannya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Khususnya untuk pembimbing II Bapak **Drs. Dias Pradadimara,M.A.,M.S.**. Terimakasih bapak untuk semua dedikasi bapak membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dengan segala kemalasan, penulis bisa sampai di titik ini berkat bapak. You're the best pak.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih untuk rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu** serta seluruh jajaran Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Juga untuk seluruh dosen Ilmu Sejarah, Ketua Departemen Bapak **Dr. Ilham. S.S.,M.Hum**, serta dosen ilmu sejarah Kak **A.Lili Evita,S.S.,M.Hum**, alm. Ibu **Magriet Moka Lappia,S.S.,M.S.**, Ibu **Dr. Nahdia Nur,M.Hum**, alm. Bapak **Prof. Dr. Rasyid Asba,M.A**, Bapak **Dr. Bambang Sulistyو, M.Hum**, Bapak, **Dr. Suriadi**

Mappangara, M.Hum, Bapak **Dr.H.Muh. Bahar Akkase Teng., LCP., M.Hum**, Bapak **Nasihin ,S.S.,M.A.** Terimakasih atas pengajaran dan didikannya selama penulis menjadi mahasiswa ilmu sejarah. Abadilah segala kebaikan kalian.

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada kepala sekretariat Ilmu Sejarah Bapak **Ujddi Pati, S.Sos**, terimakasih banyak pak, bapak adalah penyelamat atas segala kendala dalam pengurusan administrasi kampus, terimakasih pak sudah berbuat baik pada penulis. Pak uji terbaiklah.

Kepada satu sahabat baik di kampus, **Bella Astari Patta** terimakasih telah menghibur dan merusak otak dengan segala hal-hal aneh itu dan mengajak penulis naik pesawat pertama kali ke Surabaya. Kau terbaik bell. Untuk dua sahabat baik di KMHDI, **Ayumita Reskyani** dan **Eka Arya Laksmna** terimakasih telah meluangkan banyak waktu untuk berada di samping penulis, apapun masalahnya kalian adalah orang yang paling mengerti. Untuk orang-orang terkasih, yang bersama saat ini ataupun orang-orang yang telah lalu bersama waktu, sedikit atau banyaknya dukungan kalian, terimakasih banyak.

Untuk teman-teman seperjuangan **Ilmu Sejarah 2017, Pramoedya 2017, Keluarga Besar HUMANIS KMFIB-UH, Pallawa 2017, KMHDI 018, PD KMHDI SUL-SEL, IPMIL Raya UH** dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi warna yang berbeda disetiap pertemuan.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan baik materil maupun non materil dalam proses perkuliahan

dan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kemajuan penulisan lainnya.

“Om Shanti, Shanti, Shanti Om”

Makassar, 22 April 2022

Arya Yulia Andika K

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Dan Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Tinjauan Pustaka.....	13
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB 2 Gambaran Umum Kecamatan Sukamaju.....	20
2.1 Sejarah Singkat Kecamatan Sukamaju	20
2.2 Alam dan Masyarakat Transmigran.....	22
BAB 3 Kepemimpinan Tradisional.....	34

3.1	Kepemimpinan Tradisional : Aspek Politik.....	34
3.2	Kepemimpinan Tradisional : Sosial Dan Ekonomi	41
3.3	Kepemimpinan Tradisional : Aspek Keagamaan	44
3.4s	Kepemimpinan Tradisional: Aspek Tradisional Modern	46
BAB 4 Kepemimpinan Bali Kecamatan Sukamaju		55
4.1	Kepala Rombongan Transmigran.....	55
4.2	Kepemimpinan Bali Kecamatan Sukamaju	57
4.3	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Sukamaju	59
4.4	Faktor-Faktor Kepemimpinan Transmigran Bali	71
BAB 5 KESIMPULAN.....		77
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		87
Sumber Arsip		87
	Arsip Kantor Sensus dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 1976.	
	"Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 1975"	87
	Arsip Kantor Desa Sukadamai	89
	Arsip Kantor Desa Subur	90
	Arsip Kantor Desa Sukaharapan	92
	Arsip Kantor Desa Rawamangun.....	93
Kelengkapan Administrasi		94
Lembar Kontrol Bimbingan		94
SK Pembimbing		96

Surat Seminar Proposal	98
------------------------------	----

ABSTRAK

Arya Yulia Andika, Nomor Induk Mahasiswa, F061171513, dengan judul “Kepemimpinan Bali: Studi Kasus Transmigrasi Bali di Kecamatan Sukamaju Tahun 1971-1997” dibimbing oleh Amrullah Amir, S.S.,M.A..Ph.D dan Drs. Dias Pradadimara,M.A.,M.S

Kajian ini bertujuan untuk menguraikan tentang Kepemimpinan Bali: Studi Kasus Transmigrasi Bali di Kecamatan Sukamaju Tahun 1971-1997. Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah. Di mulai dengan pengumpulan sumber sejarah dengan menitikberatkan pada metode wawancara, kritik terhadap sumber sejarah, penafsiran dan penulisan sejarah. Terdapat beberapa hal yang harus dijelaskan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah faktor-faktor kepemimpinan tradisional yang membentuk kepemimpinan Bali Kecamatan Sukamaju.

Terutama faktor kepemimpinan tradisional yang terdiri dari aspek politik, aspek keagamaan, aspek sosial dan ekonomi serta aspek tradisional modern. Sebelum menempati wilayah transmigrasi, kepemimpinan Bali sebagian besar ditentukan oleh aspek keturunan. Namun pada saat menempati wilayah transmigrasi, kepemimpinan Bali Kecamatan Sukamaju ditentukan oleh aspek agama, sosial dan ekonomi, dan tradisional modern.

Kata Kunci: Transmigrasi, Kepemimpinan

ABSTRACT

Arya Yulia Andika, Student Identification Number, F061171513, with the title Bali Leadership: A Case Study of Balinese Transmigration in Sukamaju District in 1971-1997 "supervised by Amrullah Amir, S.S., M.A.Ph.D and Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S

This study aims to describe Balinese Leadership: A Case Study of Balinese Transmigration in Sukamaju District 1971-1997. The method used is the historical method. Starting with the collection of historical sources with an emphasis on interview methods, criticism of historical sources, interpretation and writing of history. There are several things that must be explained in this research. One of them is the traditional leadership factors that shape the leadership of Bali in Sukamaju District.

Especially the traditional leadership factors which consist of political aspects, religious aspects, social and economic aspects as well as modern traditional aspects. Prior to occupying the transmigration area, Balinese leadership was largely determined by heredity. However, when occupying the transmigration area, the leadership of Bali in Sukamaju District was determined by religious, social and economic aspects, and modern traditional.

Keywords: Transmigration, Leadership

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepadatan penduduk menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun awal kemerdekaan 1945. Pemerintah Hindia Belanda sebelumnya telah menyelenggarakan suatu program kolonisasi untuk menangani masalah pemerataan penyebaran penduduk. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan tentang emigrasi pada awal abad ke-20. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda berdasarkan pidato tahta (*troom rede*) Ratu Wilhelmina pada tahun 1901¹. Permulaan penyelenggaraan transmigrasi pada tanggal 12 Desember 1950, pemerintah secara resmi melanjutkan program kolonisasi yang telah dirintis pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1905 dengan nama yang lebih nasionalis yaitu transmigrasi². Undang-Undang mengenai transmigrasi pertama kali pada tahun 1972 yakni UU Nomor 3 Tahun 1972 tentang ketransmigrasian. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian, transmigrasi adalah perpindahan yang sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

¹ Muhammad Amir, Ratnah Rahman, "Wonomulyo: Dari Kolonialisasi ke Transmigrasi 1937-1952." *Pangadereng*, Vol 6 No 1, Juni 2020, hlm. 14

² Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi R.I Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini Dan Harapan Baru*. 2015, hlm.

Transmigrasi adalah istilah Indonesia untuk migrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dimana semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah³. Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Titik pusat pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut. Transmigrasi juga berfungsi untuk mempercepat hubungan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok No. 3 tahun 1972. Salah satu daerah tujuan transmigrasi adalah Sulawesi Selatan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1973 tertanggal 4 Januari 1973 Provinsi Sulawesi Selatan ditunjuk sebagai salah satu provinsi penerima transmigran. Dari tahun 1969-1975, pemerintah berhasil mendistribusikan transmigran ke Sulawesi Selatan sebanyak 5.184 kk atau sekitar 24.241 jiwa. Sebagian besar mereka berasal dari Pulau Jawa 1.517 kk atau 7.205 jiwa berasal dari Jawa Timur, 901 kk atau sekitar 4.516 jiwa dari Jawa Tengah, 349 kk atau 1.476 jiwa dari Jawa Barat, 172 kk atau 707 jiwa dari Daerah Istimewa Yogyakarta, 250 kk atau 1.195 jiwa dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sementara yang lainnya, 1.295 kk atau 5.593 jiwa berasal dari

³ Hilda Anjarsari, Muhammad Zainuddin Badollahi, "Transmigrasi Bali di Desa Sidomakmur Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara", *Pangadereng*, Vol 4 No 2, Desember, 2018, hlm. 1.

⁴ Kuswono, I Nyoman Sukma Aditya, "Perubahan Sosial Etnis Bali di Lampung Tengah dalam Perspektif Sejarah," makalah. Dalam Seminar untuk Kebhinekaan dan ke-Indonesiaan Refleksi 60 Tahun Seminar Sejarah Indonesia" di FIB UGM, 13-16 Desember, 2016, hlm. 2

Bali. Pemerintah juga menempatkan sebagian transmigrasi asal Bali di Parigi (Sulawesi Tengah)⁵.

Sebelum tahun 1973, di daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa permukiman transmigran yang terbentuk sebelum Perang Dunia Kedua Tahun 1939 terdapat permukiman yang sudah berkembang yakni Wonomulyo di Kabupaten Polmas⁶. Luwu termasuk daerah tujuan transmigrasi di Sulawesi Selatan dimulai sejak tahun 1964 di Kecamatan Bone-bone. Tanah di Kabupaten Luwu merupakan daerah yang subur. Namun penduduknya sangat sedikit, sehingga kekurangan tenaga untuk mengerjakan lahan pertanian yang masih kosong. Akibatnya daerah tersebut kurang produktif dan hasil pertanian tidak dapat diusahakan secara maksimal.⁷ Beberapa daerah di Kabupaten Luwu yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain Kecamatan Bone-bone saat itu Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) tahun 1964 dan Kecamatan Masamba saat itu Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan Bone-bone terdiri dari beberapa dusun (saat ini desa) seperti Bone-bone, Sidomukti, Tamuku, Sidomakmur dan Sukaraya

Pada awalnya Kecamatan Sukamaju adalah desa yang terbentuk pada tahun 1971, namun seiring dengan perluasan permukiman dan kepadatan penduduk maka pada tahun 1984 berubah menjadi kecamatan⁸. Kecamatan Sukamaju terdiri

⁵ Thamrin Mattulada, "Sejarah Perekat Perbedaan (Transmigran Orang Bali di Kabupaten Mamuju)". *Walasuji* Vol 8, No 1, Juni, 2017, hlm. 131

⁶ Hilda Anjarsari, Muhammad Zainuddin Badollahi, " Transmigrasi Bali di Desa Sidomakmur Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara" *Pangadereng* Vol 4 No 2 Desember, 2018, hlm. 312

⁷ Iriani, "Mempertahankan Identitas Etnis: Kasus Orang Jawa Di Desa Lestari, Kecamatan Tomoni Timur", *WALASUJI* Vol 9, No 1, Juni, 2018, hlm. 90

⁸ Abdul Hafid, "Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan", *Jurnal "Al-Qalam* Vol 22 No 1 Juni, 2016, hlm. 259

dari 25 desa yang semuanya bersifat definitif. Luas wilayahnya $\pm 255,48 \text{ km}^2$. Desa yang paling jauh dari ibukota adalah Desa Minangga Tallu, yaitu berjarak sekitar 15 km dari Desa Sukamaju yang juga merupakan ibukota dari Kecamatan Sukamaju⁹. Diantara 25 desa yang ada di Kecamatan Sukamaju, enam diantaranya dihuni oleh masyarakat transmigran yang berasal dari Bali. Tidak ada perkampungan khusus untuk transmigran yang berasal dari Bali melainkan berbaur dengan transmigran dari Jawa dan Toraja.

Perkampungan yang menerima transmigran Bali yang pada saat itu merupakan bagian dari 8 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah Desa Sukamaju, Desa Rawamangun, Desa Sukadamai, Desa Minangga Tallu, Desa Subur dan Desa Sukaharapan. Desa Sukamaju menjadi desa pertama yang menerima transmigran Bali di Wilayah Kecamatan Sukamaju pada Maret 1971 sebanyak 75 KK¹⁰ atau kurang lebih 369 jiwa. Desa Sukadamai menerima transmigran Bali pada 15 Desember 1971 dengan jumlah transmigran terbanyak sebanyak 100 KK atau kurang lebih sekitar 428 orang/jiwa meskipun sebelumnya masyarakat dari Jawa Timur telah menempati lokasi ini 5 hari sebelum kedatangan transmigran Bali dengan jumlah 60 KK¹¹ atau kurang lebih 300 jiwa. Disusul desa selanjutnya yakni Desa Rawamangun yang pada saat itu adalah nama dusun termasuk ke dalam UPT Mulyorejo 1 sebelum akhirnya menjadi Desa Rawamangun. Desa Rawamangun menerima sebanyak 150 KK¹² atau kurang lebih 696 jiwa. Desa selanjutnya adalah Desa Subur pada tahun 1975 sebanyak 90

⁹ Ibid.

¹⁰ Wawancara dengan Wayan Karbi tanggal 2 Januari 2021 di Desa Sukamaju

¹¹ Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Widiananda tanggal 29 Januari 2021 di Desa Sukadamai

¹² Wawancara dengan Wayan Suja tanggal 25 Januari 2021 di Desa Rawamangun

KK apabila di totalkan dengan transmigran Jawa sebanyak 150 KK. Desa Subur mulanya adalah dusun dan termasuk kedalam UPT Mulyorejo 3 sebelum akhirnya menjadi sebuah desa.¹³ Dua desa lainnya adalah Desa Minangga Tallu dan Desa Sukaharapan. Desa Minangga Tallu menerima transmigran pada tanggal 2 Agustus 1977 sebanyak 25 KK pada tahap pertama dan 25 KK pada tahap kedua. Transmigran Bali di Desa Minangga Tallu termasuk dalam program transmigrasi mandiri dengan seluruh biaya ditanggung oleh masing-masing transmigran.¹⁴ Dan desa terakhir adalah Desa Sukaharapan pada tahun 1978 sebanyak 5 KK. Seperti Desa Minangga Tallu, Desa Sukaharapan juga merupakan masyarakat transmigrasi swakarsa mandiri.

Kehidupan awal masyarakat transmigran Bali terbilang sulit. Selain kebutuhan pangan yang sulit, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru ini. Masyarakat mulai menata kehidupan mereka yang baru, mulai dari bidang keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Memindahkan penduduk terutama Suku Bali bukanlah perkara mudah mengingat mereka adalah masyarakat yang sangat berkeyakinan terhadap nilai dan norma Hinduisme, menjadi Bali identik dengan menjadi Hindu dan tinggal di Bali¹⁵. Banyak tradisi masyarakat Bali yang turut dibawa para transmigran ke daerah mereka yang baru seperti tradisi perkawinan dan kematian. Salah satu yang juga sangat kental dengan masyarakat Bali adalah sistem kasta. Bagi orang Bali kasta adalah sebuah sistem yang identik kaitannya dengan Hinduisme dengan seluruh perangkatnya

¹³ Wawancara dengan Wayan Narka tanggal 29 Januari 2021 di Desa Subur

¹⁴ Wawancara dengan Ketut Setu tanggal 27 Januari 2021 di Desa Minangga Tallu

¹⁵ Anwar, "Ini kan Bukan Bali": Interaksi antar-Kasta Masyarakat Transmigran di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan", *ETNOSIA Jurnal Etnografi Indonesia* Vol 1 No 2. Desember, 2016, hlm. 1

dan dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemberian Tuhan, oleh penganutnya dipandang sebagai sesuatu yang terwariskan kaku mengikat serta sulit berubah¹⁶. Menurut kitab-kitab suci orang Bali masyarakat terbagi dalam empat lapisan yaitu *brahmana*, *ksatria*, *weisy* dan *sudra*. Ketiga lapisan pertama biasa disebut *triwangsa* sedangkan lapisan terakhir disebut *jaba* yang merupakan lapisan dengan jumlah warga terbanyak. Keempat lapisan tersebut terbagi lagi dalam lapisan-lapisan khusus¹⁷. Keempat lapisan ini mempunyai peranan masing-masing di dalam masyarakat. Kasta *brahmana* merupakan kasta para pendeta, yang dipandang sebagai lapisan tertinggi, *ksatria* merupakan kasta orang-orang bangsawan dan tentara dipandang sebagai lapisan kedua, kasta *weisy* merupakan kasta para pedagang yang dianggap sebagai lapisan menengah (ketiga) dan *sudra* adalah kasta orang-orang biasa (rakyat jelata). Sistem ini masih melekat di masyarakat Bali hingga kini dan membentuk struktur sosial di masyarakat. Dalam banyak hal, sistem ini menjadi sangat berpengaruh.

Menurut Soerjono Soekanto, struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antarposisi sosial dan antarperan. Dengan demikian pengertian struktur sosial dapat didefinisikan sebagai suatu struktur tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peran dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat. Menurut Charles P. Loomis struktur sosial tersusun dalam sepuluh unsur yang penting diantaranya adalah adanya kedudukan dan peranan sosial yang

¹⁶ Ibid. hlm. 2

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2007), hlm.

mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat. Salah satu kedudukan yang memiliki peranan penting dalam masyarakat adalah pemimpin. Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, untuk mempengaruhi kelompok dan budayanya. Selain itu juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi¹⁸. Arti penting seorang pemimpin di tengah masyarakat tak terbantahkan adanya. Dalam setiap unsur masyarakat, pemimpin sangat berperan dalam menentukan arah suatu organisasi atau kelompok tertentu. Untuk menentukan bagaimana kepemimpinan Bali Kecamatan Sukamaju, sangatlah penting untuk melihat kondisi di masa lalu. Ketika Bali masih memiliki banyak kerajaan dan dengan sistem pemerintahan yang berubah-ubah mulai dari sistem yang ditentukan sepenuhnya oleh raja dan para bawahannya serta pemerintahan kerajaan dengan campur tangan pemerintah Hindia Belanda.

Penduduk Bali yang memutuskan untuk bertransmigrasi ke daerah yang baru harus dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada diantara masyarakat mereka saja, namun beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan orang-orang dari beberapa daerah di Pulau Bali serta adat istiadat dan tradisi yang baru. Secara tidak langsung lingkungan dan situasi yang baru ini, membentuk struktur sosial yang baru. Di dalam sebuah struktur sosial, banyak hal yang

¹⁸ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2014), hlm. 2

mungkin saja mempengaruhi dan memberikan perubahan dalam pembentukan pola kepemimpinan yang baru di masyarakat transmigran Bali dengan melihat aspek lain yang bisa mempengaruhi terbentuknya kepemimpinan Bali Kecamatan Sukamaju melalui aspek tradisional modern yang dibentuk atas aspek tradisional dengan standar yang lebih modern. Melihat aspek-aspek inilah penulis berusaha melihat faktor-faktor apa saja yang membentuk kepemimpinan transmigran Bali dalam pembentukan struktur sosial yang baru.

1.2 Batasan Dan Rumusan Masalah

Batasan spasial kajian ini adalah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, sementara batasan temporalnya tahun 1971-1997. Penulis mengawali tahun 1971 sebagai periode awal dari penelitian ini karena pada tahun 1971 adalah tahun awal kedatangan transmigran Bali di salah satu desa di Kecamatan Sukamaju yakni Desa Sukamaju. Tahun ini sangat penting guna melihat kondisi awal kepemimpinan transmigran di daerah transmigrasi. Tahun 1997 sebagai periode akhir penulisan dikarenakan tahun terakhir pemilu pada masa orde baru maka penting untuk melihat pengaruh pemilu terhadap kepemimpinan di daerah transmigran dan keberadaan pemimpin transmigran Bali dalam proses pemilu. Penelitian ini akan menitikberatkan pada hasil wawancara dengan pelaku sejarah saat itu atau orang-orang yang terlibat langsung seperti tokoh-tokoh agama, ketua adat, kepala desa dan tokoh-tokoh yang memiliki peran penting selama periode tersebut. Dalam kurun waktu 26 tahun, banyak peristiwa yang dialami oleh para transmigran. Pergantian pemimpin kerap kali di laksanakan, hal inilah yang akhirnya membentuk sebuah tatanan masyarakat yang baru. Dari sini penulis

ingin melihat pola kepemimpinan transmigran Bali dalam membangun tatanan masyarakat dengan karakteristik kepemimpinan baru yang baru selama 26 tahun dimulai dari tahun 1971-1997.

Di dalam suatu tulisan, rumusan masalah sangatlah penting untuk memudahkan penulis dalam mengarahkan pengumpulan data yang relevan terkait penelitian ini. Berikut yang akan menjadi landasan dalam penulisan nantinya pada bab-bab selanjutnya. Berkaitan dengan hal-hal diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan transmigran Bali Kecamatan Sukamaju dan Sejauh mana faktor – faktor tersebut mempengaruhi kepemimpinan transmigran Bali baik yang bersifat historis maupun faktor yang bersifat kontemporer atau modern?
2. Perubahan apa saja yang terjadi antara kepemimpinan Bali Kecamatan Sukamaju di daerah transmigrasi dan daerah asal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dirumuskan secara umum digunakan untuk memperoleh gambaran dari objek yang akan diteliti. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan perencanaan dasar dari perumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan transmigran Bali Kecamatan Sukamaju

2. Untuk mengetahui sejauh Perubahan yang terjadi antara kepemimpinan Bali Kecamatan Sukamaju di daerah transmigrasi dan daerah asal.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah literatur kepustakaan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu pengetahuan sejarah.
2. Sebagai suatu sarana informasi bagi pihak yang berkepentingan baik dalam penanganan daerah transmigrasi maupun sebagai informasi tambahan mengenai sejarah sosial khususnya terkait transmigrasi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian sejarah selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, diperlukan sebuah metode untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip guna menemukan kebenaran dari suatu permasalahan yang ada. Penelitian ini berbasis penelitian sejarah (*historis*). Untuk mendapatkan hasil penulisan yang berdasarkan penelitian sejarah langkah-langkah yang ditempuh untuk menghasilkan tulisan sejarah adalah menggunakan metode sejarah yang mencakup:

1. Pencarian sumber

Pengumpulan yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan. Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber primer dengan penelitian langsung ke lapangan baik berupa pencarian data dalam bentuk dokumen dan catatan-catatan atau rekaman

langsung yang melibatkan saksi mata. Selain menggunakan sumber primer, penulis juga menggunakan sumber sekunder yang berkenaan dengan penelitian. Sumber sekunder bisa didapatkan dari buku-buku di perpustakaan dan rujukan-rujukan internet berupa jurnal. Sumber sekunder digunakan sebagai penunjang dan pelengkap penelitian ini.

2. Kritik sumber

Pada tahapan kritik sumber, penulis melakukan kritik terhadap sumber yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian ini. Tahapan ini berguna untuk menentukan apakah sumber yang diperoleh dapat digunakan atau tidak. Dalam tahapan ini, dilakukan dua jenis kritik yakni kritik internal dan eksternal. Kedua kritik tersebut digunakan penulis untuk memverifikasi mengenai keaslian dan keabsahan sumber-sumber yang diperoleh baik berupa dokumen, ataupun hasil wawancara. Dokumen-dokumen dapat diperoleh dari kantor-kantor desa dan kantor kecamatan, sedangkan wawancara dapat dilakukan di masing-masing rumah informan di setiap desa yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam wawancara, terlebih dahulu peneliti akan membuat rumusan-rumusan pertanyaan secara tertulis, yang didasarkan pada tujuan awal penelitian dan menggunakan konsep-konsep baku, sehingga bersifat ilmiah. Dari rumusan-rumusan masalah yang telah dikonsepskan, peneliti juga akan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya adalah; siapa (*who*), bagaimana (*how*), kapan (*when*) dan dimana (*where*). Kelima aspek tersebut mutlak dibutuhkan untuk menghindari bias dalam wawancara yang

mengakibatkan penggalian data menjadi tidak tuntas. Hal yang terpenting adalah penentuan informan atau orang yang akan dijadikan sasaran wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi¹⁹.

3. Penafsiran

Pada langkah ini penulis berusaha untuk menguraikan dan menghubungkan data-data yang telah diperoleh kemudian diberikan penafsiran untuk merekonstruksi peristiwa sejarah sehingga dapat di mengerti. Dengan demikian, penulisan dapat melanjutkan tahap yang selanjutnya yaitu tahap penulisan sejarah yang berdasarkan pada penafsiran peneliti.

4. Penulisan Sejarah

Sebagai fase akhir dalam metode sejarah, penulisan sejarah disini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Sebagai tahap akhir dalam sebuah penelitian, penulis berusaha untuk menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin sebagai sebuah penelitian sejarah. Penulisan penelitian ini berdasarkan proses kronologi sehingga peristiwa sejarah tidak menjadi kabur. Oleh sebab itu, penulisan sejarah harus berurutan dari awal hingga akhir. Penulisan atau penyajian ada tahap ini merupakan hasil dari penafsiran peneliti berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh.

¹⁹ Nanang Triadi. 2015. "Pola Sosial Intersected Masyarakat Transmigran Jawa Dengan Masyarakat Penduduk Lokal". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal. 30

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari 2021 – Januari 2022. Lokasi ini dipilih karena Kecamatan Sukamaju adalah salah satu kecamatan dengan masyarakat transmigran di Kabupaten Luwu Utara dengan kondisi sosial yang teratur.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penelitian kepustakaan sangatlah penting bagi penelitian yang dikaji. Penelitian tentang masyarakat transmigrasi Bali sebenarnya sudah banyak yang mengkaji dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Namun, dalam tulisan ini peneliti hanya akan mencantumkan beberapa hasil penelitian sebagai kategorisasi pustaka yang berkaitan dengan tema penulisan di atas. Adapun bentuk-bentuk kategori yang peneliti temukan seperti buku-buku atau tulisan yang sudah di bukukan dan jurnal-jurnal hasil penelitian. Dalam penulisan nantinya, penulis akan menggunakan sudut pandang sosial, sebab nantinya penulis akan mengkaji Kepemimpinan Bali Studi Kasus Transmigran Bali di Kecamatan Sukamaju Tahun 1971-1997. Untuk menjadi pembanding dari penulisan yang penulis lakukan, dapat diajukan

Michael Pichard dalam bukunya “*Kebalian*” menjelaskan bahwa faktanya adalah jika parisada awalnya sangat terinspirasi oleh neo-Hinduisme India, seiring berjalannya waktu, birokratisasinya dan afiliasinya pada Golkar, dengan ditambah dengan dominan yang dipertahankan oleh *triwangsa* dalam lembaga ini dan terutama kaum *brahmana* telah menggiringnya untuk mengadopsi posisi yang

semakin koservatif dan kembali memusatkan perhatian pada identitas Bali-nya, seperti ditunjukkan oleh keengganan pimpinannya untuk berkantor di Jakarta. Sejak saat itu, pertikaian semakin meningkat antara faksi tradisional yang berakar pada masyarakat pedesaan dan kaum bangsawan, yang menutup diri ke Bali semata, dan faksis modernis yang diusung oleh kelas menengah perkotaan dan kaum intelektual yang terbuka bagi Indonesia dan semakin beralih ke India²⁰. Dominasi kaum *triwangsa* dalam pergolakan kepemimpinan di lembaga keumatan bahkan masih terjadi hingga tahun 1990-an. Hal ini mungkin saja masih terjadi di tengah masyarakat transmigran Bali. Sehingga dominasi kelompok tertentu menentukan pola kepemimpinan masyarakat transmigran.

Soerjono Soekanto dalam bukunya "*Sosiologi Suatu Pengantar*" menjelaskan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang-perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru saja terjadi apabila orang-orang perorangan saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian dan lain sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis²¹. Dapat dipahami bahwa masyarakat transmigran yang berasal dari berbagai daerah di Bali melakukan interaksi sosial dan membentuk sebuah struktur sosial yang baru di masyarakat. Di dalam buku ini juga menjelaskan

²⁰ Michel Picard, *Kebalian*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.2020) hlm. 222

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta:Rajawali Pers.2007), hlm. 54

bahwa kepemimpinan ada yang bersifat resmi (*formal leadership*), yaitu kepemimpinan yang tersimpul didalam suatu jabatan, ada pula kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinannya. Suatu perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan yang resmi dengan yang tidak resmi (*informal leadership*) adalah kepemimpinan yang didalam pelaksanaannya selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan resmi. Dengan demikian, daya cakupnya agak terbatas. Kepemimpinan tidak resmi, mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat²². Masyarakat pada umumnya mengenal dua jenis kepemimpinan ini, begitupun dengan transmigran Bali di Kecamatan Sukamaju, lembaga-lembaga pemerintahan seperti kantor desa, kantor kecamatan, PHDI²³, dan lembaga keumatan seperti lembaga adat.

Tulisan yang disusun oleh Cokorda Istri Kumala Dewi dalam jurnal Vidya Werta "*Kepemimpinan Hindu: Dialektika Konsep Tradisional dan Modern*" menjelaskan bahwa masyarakat saat ini sedang bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat postmodern. Pola kepemimpinan juga mengalami perubahan. Kepemimpinan tradisional biasanya berlangsung secara turun temurun dalam arti bahwa jika orang tuanya menjadi pemimpin maka anak dan cucunya memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pemimpin yang disebabkan oleh garis keturunan. Kepemimpinan masyarakat tradisional Bali disamping karena lokal

²² Ibid. hlm 250

²³ Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) secara resmi dikukuhkan pada Kongres ke-6 Parisada pada September 1991 merupakan sebuah majelis organisasi umat Hindu yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial masyarakat Hindu di Indonesia.

jenius yang dimiliki juga sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep kepemimpinan Hindu. Cukup banyak konsep-konsep kepemimpinan Hindu yang diwarisi saat ini seperti *Asta Brata*, *Catur Naya Sandi* dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman kini berkembang konsep-konsep kepemimpinan modern sebagaimana disampaikan oleh Bourdieu²⁴. Perpindahan masyarakat dalam skala yang besar ke suatu tempat yang baru juga memungkinkan terjadinya perubahan budaya masyarakat termasuk pola kepemimpinannya. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan yang baru memaksa mereka untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut.

Veithzal Rivai Zainal, dkk dalam bukunya "*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*" menjelaskan bahwa kepemimpinan pada hakikatnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Sumber /pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal apabila seorang pemimpin memiliki posisi manajerial didalam sebuah organisasi. Sedangkan sumber pengaruh tidak formal muncul diluar struktur organisasi formal. Dengan demikian seorang pemimpin dapat muncul dari dalam organisasi atau karena ditunjuk secara formal. Dengan demikian pengaruh pemimpin sangat ditentukan oleh statusnya yaitu pimpinan formal atau pimpinan informal²⁵. Keberadaan pemimpin ditengah-tengah masyarakat memang tidak dapat dipungkiri, peran pemimpin sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan, baik kepemimpinan formal maupun informal.

²⁴ Cokorda Istri Kumara Dewi, "Kepemimpinan Hindu: Dialektika Konsep Tradisional dan Modern", *Vidya Werita* Vol 2 No 2, 2019, hlm. 251

²⁵ Veithzal. Rivai Zainal dkk, "*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*", (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2014), hlm. 3

Chairul Chalik (2017) dalam bukunya "*Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*" menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat selalu dijumpai kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, walaupun perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada perang yang dia atau mereka mainkan. Satu individu atau sekelompok inilah yang lazim disebut elit²⁶. Peranan elit inilah yang bisa sangat berpengaruh dalam pembentukan pola kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki golongan elit bisa sangat berpengaruh dalam banyak hal di masyarakat seperti pemilihan pemimpin dalam sebuah organisasi masyarakat.

Tulisan yang disusun oleh Anwar (2016) dalam jurnal ETNOSIA Etnografi Indonesia yang berjudul "*Ini kan Bukan Bali: Interaksi antar-kasta masyarakat Transmigran di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status sosial masyarakat di Bali yang didasarkan pada sistem kasta (*ascribed status*), sementara status sosial masyarakat transmigran Bali di Kertoraharjo didasarkan pada capaian dalam berbagai bidang kehidupan orang Bali. Sementara penggunaan kasta didalam masyarakat dipengaruhi oleh wilayah interaksi itu terjadi seperti tempat ibadah dan rumah pendeta atau segala hal yang berhubungan antara manusia dan Tuhan.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada pengaruh apa saja yang membentuk kepemimpinan transmigran Bali dengan terbentuknya satu lembaga Hindu yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia di tingkat kecamatan dan desa dengan melihat beberapa faktor yang

²⁶ Abdul Chalik, :*Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017), hlm. 26

mungkin saja terlibat dalam proses tersebut seperti faktor internal dan faktor eksternal seperti ekonomi, kasta dan dominasi kelompok tertentu.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan tulisan yang tersusun secara kronologis maka dalam penyusunan karya tulis yang berjudul *Kepemimpinan Bali: Studi Kasus Transmigran Bali di Kecamatan Sukamaju Tahun 1971-1997* penulis akan menyusun dalam lima bagian yang dimuat secara sistematis. Berikut ini gambaran dalam setiap babnya.

- Bab I berisi gambaran umum mengenai alasan penulis mengambil tema dan judul penelitian ini. Dalam bab I penulis juga memaparkan batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta tinjauan pustaka yang menunjang data untuk penulisan karya tulis ini.
- Bab II pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai Kecamatan Sukamaju dengan sub bab yang terdiri dari sejarah singkat Kecamatan Sukamaju serta alam dan masyarakat transmigran.
- Bab III pada bab ini akan menjelaskan kepemimpinan tradisional dengan sub bab kepemimpinan tradisional: aspek politik, kepemimpinan tradisional: aspek sosial dan ekonomi, kepemimpinan tradisional: aspek keagamaan dan kepemimpinan tradisional: aspek tradisional modern.
- Bab IV pada bab ini terdiri atas sub bab yakni: Kepala rombongan, kepemimpinan Bali Kecamatan Sukamaju, Parisada Hindu Dharma

Indonesia Kecamatan Sukamaju dan faktor-faktor kepemimpinan transmigran Bali

- Bab V pada bab ini berdasarkan hasil dari penjabaran ke-empat Bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam tulisan Kepemimpinan Bali: Studi Kasus Masyarakat Transmigran Bali di Kecamatan Sukamaju Tahun 1971-1997. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah yang penulis ajukan, sekaligus merupakan penutup dari karya tulis ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

BAB 2

Gambaran Umum Kecamatan Sukamaju

2.1 Sejarah Singkat Kecamatan Sukamaju

Sejak kedatangan transmigran Bali pada tahun 1971 di Sukamaju lalu disusul oleh kedatangan transmigran lainnya mengisi kawasan-kawasan di sekitar yang masih kosong di 8 titik unit permukiman transmigrasi. Dengan jumlah demikian pemerintah merasa perlu untuk melaksanakan pemekaran wilayah, hal ini dikarenakan, kebutuhan untuk kemudahan pelayan publik. Pemekaran kecamatan adalah suatu proses pemecahan kecamatan dari satu kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan. Tujuan pemekaran kecamatan yang paling mendasar adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan kantor pemerintahan kecamatan yang lebih dekat dengan masyarakat²⁷. Pemekaran wilayah adalah salah satu tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, tambahan lembaran negara nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintah desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang perlunya mengakui serta menghormati asal usul daerah yang istimewa sehingga di tetapkan Undang-

²⁷ Laila Sabeita, Irwan Noor, Suwono, "Pemekaran Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan", *Jurnal administrasi publik* Vol 1 No 3 H 115-124, 2013, hlm.120

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Adapun syarat-syarat pemekaran kecamatan berpedoman dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang tercantum didalamnya syarat pemekaran kecamatan pada pasal 3 yaitu: a). Jumlah penduduk; b). Luas Wilayah; c). Jumlah desa atau kelurahan. Adapun tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran wilayah. Menurut Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran dan Pembentukan Penggabungan Daerah yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Kecamatan Bone-bone tahun 1984 dimekarkan menjadi Kecamatan Sukamaju dengan luas wilayah $\pm 255,48$ km² yang terdiri dari 25 desa definitif. Namun belum dapat diketahui dengan pasti surat keputusan yang menyatakan beberapa desa di wilayah kecamatan Bone-bone dimekarkan menjadi Kecamatan Sukamaju. Berikut nama-nama camat Kecamatan Sukamaju sejak tahun 1984 sampai tahun 2000.

No.	Nama	Tahun
1.	Drs. H. Najamuddin	1984-1987
2.	Drs. A. Chaeril Pangerang	1988-1990
3.	Drs. Haidar M.T	1990-1995
4.	Drs. F.P. Patuang	1995-1997
5.	Drs. Husain A. Baso	1997-2000

Tabel 1.1 Daftar Nama Camat Sukamaju

2.2 Alam dan Masyarakat Transmigran

Sebelum terbentuk menjadi kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/III/1999 Tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No. 136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999. Tepatnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 1999 yang terdiri dari 9 kecamatan. Luwu Utara merupakan bagian dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu merupakan salah satu wilayah Daerah Tingkat II Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 16 Kecamatan. Adapun letak geografis proyek-proyek transmigrasi di kabupaten Luwu terletak antara 120°20'-121°40' lintang selatan dan tersebar didalam empat kecamatan tersebut, yang merupakan salah satu daerah transmigrasi yaitu Kecamatan Bone-bone, Kecamatan Masamba, Kecamatan Wotu, dan Kecamatan

Mangkutana²⁸. Salah satu kecamatan yang menjadi daerah transmigrasi adalah Kecamatan Bone-bone yang pada tahun-tahun berikutnya mengalami pemekaran dan membentuk kecamatan yang baru. Kecamatan Bone-Bone hingga tahun 1978 terdiri dari ±17 desa dan 12 diantaranya adalah desa penerima transmigran dari Jawa dan Bali. Kecamatan Bone-bone pertama kali menerima transmigran Bali pada tahun 1970 berlokasi di Desa Sidomakmur dengan jumlah 100 KK dan hingga saat ini Sidomakmur tetap menjadi bagian dari Kecamatan Bone-bone.

Kehidupan transmigran terbilang sulit pada tahun-tahun pertama menginjakkan kaki di daerah transmigran khususnya Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu pada saat itu adalah salah satu lokasi transmigrasi masyarakat dari Jawa, Bali dan Lombok. Kondisi geografis yang minim pembangunan seperti jalan umum dan sarana penunjang kehidupan masyarakat menjadi salah satu kendala awal masyarakat transmigrasi saat itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wayan Suja, perjalanan dimulai dari tempat pemberhentian terakhir yang memiliki jarak paling dekat dengan tempat tujuan. Untuk menuju ke lokasi transmigrasi, perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Salah satu contoh adalah tujuan Desa Subur yang melakukan pemberhentian terakhir di Desa Sukamaju, sehingga untuk tiba di Desa Subur, masyarakat harus menempuh jarak sekitar 10 km dengan membawa semua perbekalan melewati jalanan becek dan dipenuhi semak-semak dan pohon-pohon besar dengan beberapa batang kayu yang menjadi jembatannya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, masyarakat

²⁸ Hilda Anjarsari, Muhammad Zainuddin Badollahi, “Transmigrasi Bali di Desa Sidomakmur Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara”, *Pangadereng* Vol 4 No 2, 2018, hlm. 37

transmigran akan tiba di lokasi penempatan transmigrasi. Tibanya di daerah transmigrasi, masyarakat akan diarahkan ke lahan rumah yang telah disiapkan oleh pemerintah. Luas lahan untuk hunian ini adalah 50 m² x 50 m² dengan rumah yang berukuran 4 m x 7 m dengan satu kamar tidur dan dapur. Di dalam rumah tersebut telah dilengkapi dengan peralatan bertani, persediaan makanan seperti beras, garam dan ikan teri. Hanya saja, rumah itu tidak dilengkapi dengan sarana mandi dan mencuci. Hal tersebut memaksa masyarakat untuk membangun secara mandiri sarana mandi dan mencuci dengan berbekal perlengkapan bertani untuk menggali lubang dan membuat dinding dengan daun kelapa dan batang pohon. Bukan hanya tidak dilengkapi sarana untuk mandi dan mencuci, rumah ini juga tidak dilengkapi dengan penerangan yang mengharuskan masyarakat untuk datang ke pasar tradisional terdekat untuk membeli penerangan yaitu pelita ataupun membuat sendiri dengan bahan seadanya²⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Narka, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain menggunakan persediaan makanan yang di berikan oleh pemerintah. Masyarakat juga mulai mengolah lahan pertanian yang berikan pemerintah dengan luas sawah 1 ha dan ladang ¼ ha. Banyak tahapan yang harus dilalui untuk mengolah lahan tersebut, mulai dari membersihkan lahan yang dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu sebab kondisi lahan memang penuh dengan semak belukar sehingga perlu sangat berhati-hati dalam membersihkan lahan tersebut untuk menghindari binatang yang dapat membahayakan seperti ular yang banyak ditemukan di daerah rawa seperti daerah Subur dan Rawamangun.

²⁹ Wawancara dengan I Wayan Suja pada tanggal 25 Januari 2021 di Desa Rawamangun.

Namun karena waktu yang sedikit lebih lama untuk mengolah lahan pertanian, masyarakat akan menggunakan lahan yang ada disekitaran rumah mereka untuk menanam beberapa bahan-bahan makanan seperti ubi jalar, jagung, dan sayur sayuran sembari menunggu lahan pertanian dapat digunakan. Lahan pertanian mulanya digunakan untuk menanam padi atau tumbuhan lainnya sesuai dengan keadaan di desa masing-masing, namun pada umumnya padi, coklat, kedelai dan kelapa adalah komoditas utamanya. Pada saat itu harga padi bisa mencapai Rp.7.000-11.000/ kwintal sementara harga kedelai mencapai Rp.17.000/kwintal³⁰.

Untuk meningkatkan perekonomian, masyarakat mulai memperluas sumber penghasilan bukan hanya dari penghasilan pertanian, tetapi perlahan mulai merambat ke bidang peternakan seperti ternak babi, sapi dan ayam. Mulai dengan memelihara satu ekor yang kemudian di ikatkan di pohon-pohon sekitaran rumah lalu berkembang menjadi peternakan kecil dengan kandang yang mulai memadai. Saat itu harga satu ekor sapi adalah Rp.3.500/ekor, babi seharga Rp. 800-1.000/ekor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Bagus Ketut Widiana, sebagian besar profesi masyarakat adalah petani dan peternak, namun terdapat beberapa orang yang bekerja sebagai tukang bangunan, tukang kayu dan penjahit yang pada dasarnya adalah profesi yang ditekuni di daerah asal. Sementara masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai akan melanjutkan pendidikan jenjang Diploma 2 (D2) di ibu kota provinsi yakni Ujung Pandang saat ini Makassar dengan harapan setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi

³⁰ Wawancara dengan I Wayan Narka pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Subur

akan menjadi tenaga pendidik atau mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor pemerintahan³¹.

Kantor-kantor urusan pemerintahan saat itu masih sebatas kantor-kantor desa, kantor camat dan kantor pelayanan kesehatan. Adapun desa-desa yang termasuk kedalam pemekaran Kecamatan Bone-bone dan menjadi Kecamatan Sukamaju adalah:

1. Desa Sukamaju

Desa Sukamaju adalah desa yang terbentuk di tahun 1971. Dulunya kawasan desa ini adalah hutan yang pertama kali di huni oleh masyarakat Jawa pada tahun 1971 dan disusul beberapa bulan kemudian oleh masyarakat transmigran Bali pada Maret 1971 melalui program transmigrasi umum. Jumlah transmigran yang datang sebanyak 250 KK dengan total 1.212 jiwa dengan 75 KK atau sekitar 369 jiwa yang berasal dari Bali dan sisanya berasal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah³².

2. Desa Sukadamai

Desa Sukadamai adalah desa yang terbentuk pada 15 Desember 1971. Kawasan ini dahulu adalah hutan yang dihuni pertama kali oleh masyarakat transmigran Jawa pada 10 Desember 1971 100 KK yang terdiri dari 2 wilayah yakni Jawa Timur sebanyak 300 jiwa dan dari Jawa Tengah sebanyak 337 jiwa. 5 hari sebelum masyarakat transmigran Bali datang ke

³¹ Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Widiana pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Sukadamai

³² Kantor Sensus dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 1976. "Sulawesi Selatan dalam angka Tahun 1975". hlm. 32

kawasan ini melalui program transmigrasi umum³³. Jumlah penduduk transmigran yang datang pada saat itu adalah 250 KK atau kurang lebih sekitar 1.286 orang/jiwa. Dengan transmigran Bali yang berjumlah 100 KK atau total 478 orang/jiwa dan selebihnya berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta³⁴. Desa Sukadamai memiliki luas wilayah 3.456 km². Sejak terdiri tahun 1971, Desa Sukadamai dipimpin oleh pejabat sementara kepala Desa Sukadamai yang bernama Soehadi pada Tahun 1971 sampai 1973. Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat adalah Sitanggi tahun pemilihan 1977 dan resmi menjabat tahun 1977-1982 dan I Gusti Putu Raka tahun pemilihan 1982 dan resmi menjabat sejak tahun 1982-1984³⁵. Pemilihan baru diadakan lagi pada tahun 2002, sampai saat ini belum diketahui alasan kekosongan jabatan kepala desa sejak tahun 1985-2001.

3. Desa Rawamangun

Pada tahun 1973, Rawamangun masuk menjadi salah satu kesatuan desa induk yaitu Desa Mulyorejo Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu. Pada Tahun 1990 terjadi pemekaran desa menjadi dua yaitu Desa Mulyorejo dan Desa Rawamangun. Desa Rawamangun menjadi desa persiapan Desa Rawamangun. Kepala desa persiapan Desa Rawamangun pada waktu itu dijabat oleh Bapak Suyono dengan jumlah enam dusun yaitu:

³³ Arsip Kantor Desa Sukadamai

³⁴ Kantor Sensus dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 1976. "Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 1975". hlm. 32

³⁵ Arsip Kantor Desa Sukadamai

1. Dusun Sumber Jaya
2. Dusun Mekar Jaya
3. Dusun Purwodadi
4. Dusun Tanjung Sari
5. Dusun Yosomulyo
6. Dusun Mataram

Dua tahun kemudian tepatnya tahun 1993 Desa Rawamangun menjadi desa definitif dengan luas desa 3,98 km² yang dipimpin oleh bapak H.Hasmin sampai pada tahun 2001³⁶. Desa ini dihuni oleh transmigran Bali melalui program transmigrasi umum.

4. Desa Subur

Desa subur bermula dari penempatan transmigrasi umum pada tahun 1974, 1975 dan 1976 dengan nama lokasi Unit Desa Transmigrasi Mulyorejo I. Unit Mulyorejo I,II dan III berada di bawah binaan Proyek Pembinaan Pengembangan Desa Transmigrasi (P3TD) sejak bulan September 1974 sampai dengan 1982. Selanjutnya pada bulan Februari 1983 Unit Desa Transmigrasi Mulyorejo I, Mulyorejo II, dan Mulyorejo III bersama unit desa transmigrasi lainnya di wilayah Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu dibina menjadi desa-desa dibawah naungan dan binaan Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu.

Sejak saat itulah eks Unit Desa Transmigrasi Mulyorejo II menjadi 3 dusun yaitu:

³⁶ Arsip Kantor Desa Rawamangun

1. Dusun Wonokerto
2. Dusun Spontan
3. Dusun Sumber Agung

Sedangkan eks Unit Desa Transmigrasi Mulyorejo III menjadi 2 dusun yaitu:

1. Dusun Ujung Baru
2. Dusun Ujung Sari

Selanjutnya eks Unit Desa Transmigrasi II dan III digabung menjadi satu desa yaitu Desa Mulyorejo Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu. Kemudian pada tanggal 19 November 1985 wilayah Dusun Wonokerto, Dusun Spontan, Dusun Sumber Agung, Dusun Ujung Baru dan Dusun Ujung Sari di mekarkan dari Desa Mulyorejo menjadi desa persiapan Wonokerto. Lima tahun kemudian tepatnya pada tanggal 11 November 1990, Desa Wonokerto dimekarkan lagi menjadi dua desa yaitu Desa Wonokerto dan Desa Persiapan Sumber Baru. Desa persiapan Sumber Baru terdiri dari 3 dusun yaitu:

1. Dusun Ujung Sari
2. Dusun Purwosari
3. Dusun Tanduk Tedong

Tahun 1991 Desa Wonokerto dimekarkan kembali yaitu yang awalnya Dusun Ujung Sari menjadi desa persiapan Subur. Desa persiapan Subur terdiri dari empat dusun yaitu:

1. Dusun Ujung Sari seluas 1,59 km²
2. Dusun Tambak Sari 1,46 km²
3. Dusun Palempa 6,19 km²
4. Dusun Pasabbeng 1,36 km²

Desa persiapan Subur dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan kecamatan yakni Agus Salim yang pelaksanaannya dijabat oleh Samadi dan sekretaris Poniman. Pada tahun 1992 Desa Subur menjadi desa definitif dengan luas wilayah 10,61 km² dan dijabat oleh kepala desa pertama Suparman sampai tahun 2000³⁷.

5. Desa Minangga Tallu

Sebelum terbentuk Desa Minangga Tallu, desa ini ada di wilayah Desa Lampuawa Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu tahun 1956-1983. Tahun 1977 oleh Kepala Desa pertama B. Hamsir mendatangkan transmigrasi swakarsa dari Bali sebanyak 80 KK yang ditempatkan di wilayah Balambang Selatan dan selanjutnya tempat domisilinya diberi nama Dusun Setia Darma. Setelah masa jabatan B.Hamsir berakhir tahun 1984, maka digantikan oleh Abd. Rasjid sebagai kepala Desa Lampuawa sampai pada tahun 1992. Pada akhir tahun 1992 masa jabatan kepala Desa Lampuawa berakhir dan atas SK Bupati pada saat itu mengangkat Soeratno selaku sekretaris Desa Lampuawa menjadi pejabat sementara kepala Desa Lampuawa sampai akhir tahun 1993.

³⁷ Arsip Kantor Desa Subur.

Di dalam perjalanannya pemerintahan pejabat sementara Kepala Desa Lampuawa muncul beberapa usulan dari masyarakat dan mendapat persetujuan dari pemerintah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Desa Lampuawa yang memiliki luas wilayah $\pm 47,88$ Km².
2. Pertumbuhan penduduk semakin bertambah dengan banyaknya pendatang baru.
3. Pertanian dan persawahan yang luas.
4. Lahan perkebunan kelapa sawit yang luasnya 660 Ha.
5. Dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tanggal 27 Oktober 1992 oleh pejabat sementara Kepala Desa Lampuawa bersama dengan seluruh anggota Lembaga Masyarakat Desa Lampuawa dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah Rencana Pemekaran Desa Lampuawa dengan Keputusan Desa Nomor 141/20/DLA/X/1992, tanggal 27 Oktober 1992 dan diajukan ke Bupati Luwu melalui Plt. Camat Sukamaju Darwis Azis, BA. Nama desa yang diusulkan awalnya Muara Tiga, karena pertengahan wilayah Balambangi Dusun Setia Darma terletak di Muara Tiga sungai yang bersatu yaitu Sungai Balambangi, Sungai Deko (Salu Deko), dan Sungai Posa'a yang akhirnya atas saran tokoh adat dan tokoh masyarakat disepakati nama desa pecahan Desa Lampuawa adalah Desa Persiapan Minangga Tallu yang dalam bahasa Indonesia artinya "Muara Tiga".

Adapun dusun yang terbentuk akibat pemekaran ini adalah:

1. Dusun Balambangi
2. Dusun Setia Darma
3. Dusun Salu Bua
4. Dusun Posa'a

Adapun usulan untuk menjadi pejabat kepala desa persiapan saat itu adalah Abd. Rasjid. Luas wilayah Desa Persiapan Minangga Tallu pada saat itu yaitu 24,38 km². Pada Juli 1993 Desa Persiapan Minangga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu dengan pejabat sementara Kepala Desa yaitu Abd. Rasjid. Dan tahun 1997 resmi menjadi desa definitif kemudian pada tahun 1998 diadakan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya dan yang terpilih adalah Abd. Rasjid sampai pada tahun 2006³⁸.

6. Desa Sukaharapan

Sebelum terbentuk menjadi desa Sukaharapan, desa ini adalah bagian dari Desa Sukadamai Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu pada tahun 1956-1983, atau Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu tahun 1984-1991. Pada tahun 1992 Dusun Sukaharapan mekar menjadi sebuah desa yang sebelumnya ada di wilayah Desa Sukadamai Kecamatan Sukamaju selanjutnya dimekarkan menjadi Desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju dengan luas wilayah 363,47 ha.

³⁸ Arsip Kantor Desa Minangga Tallu

Sejak dimekarkan tahun 1992 kepala desa yang menjabat pertama kali adalah I Made Madjin sampai tahun 2007. Ia menjabat sebagai kepala desa selama 15 tahun³⁹. Desa ini dihuni oleh transmigran Bali melalui program transmigrasi swakarsa mandiri atau transmigrasi spontan.

³⁹ Arsip Kantor Desa Sukaharapan